



Buku Saku 0% Pastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

JAKARTA | Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku "0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan" sebagai upaya memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

■ Ke HALAMAN 11

Bunda PAUD Ema Wakili Indonesia Terima Roadmap ECCE ASEAN

KAB. BANDUNG | Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Bunda PAUD Kabupaten Bandung Emma Dety Permana-awati dipercaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi perwakilan Indonesia dalam

menerima Dokumen ASEAN-SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education (ECCE) in Southeast Asia, di Sultan Hotel Tanah Abang Jakarta, Kamis (9/4/2026) lalu.

"Dokumen yang kami terima ini

merupakan pedoman bagi upaya kolektif kawasan dalam mewujudkan akses berkeadilan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Asia Tenggara," kata Bupati Bandung.

Peluncuran dokumen strategis yang merupakan hasil kolaborasi Kemendikdasmen bersama Sekretariat ASEAN dan Sekretariat SEAMEO ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja komprehensif, sebagai acuan perencanaan dan pengembangan pendidikan, serta pengasuhan anak usia dini di tingkat nasional maupun regional.

Menurut Mendikdasmen Abdul Mu'ti, roadmap ini menjadi langkah strategis untuk mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD secara terintegrasi lintas negara.

■ Ke HALAMAN 11



Kejagung Perkuat Pengawasan MBG untuk Tepat Sasaran

JAKARTA | Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (8/4/2026), dengan tujuan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama. Reda menyambut baik sinergi lintas lembaga yang melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawasan program strategis nasional.

■ Ke HALAMAN 11



Rehab atau Ladang Bisnis? Sawah Tergadai, Uang Hilang Tanpa Jejak

Di balik tembok-tembok fasilitas rehabilitasi narkoba, yang seharusnya menjadi tempat pemulihan dan harapan, tersimpan kisah pilu yang jarang terungkap.

Oleh: Sutiawan



lamatkan anaknya yang terjerat narkoba, rela menggadaikan garapan sawah—satu-satunya sumber penghidupan keluarga.

Dengan penuh harap, ia menyerahkan uang Rp 6.5 juta untuk biaya rehabilitasi rawat jalan. Bagi sebagian orang mungkin itu angka biasa, tetapi bagi keluarga ini, itu adalah harga dari keringat, air mata, dan masa depan yang dipertaruhkan.

Namun luka itu tidak berhenti di sana.

Bukan hanya soal perjuangan melawan ketergantungan, tetapi juga tentang bagaimana rakyat kecil harus menanggung beban yang seharusnya tidak mereka pikul—bahkan sampai mengorbankan segalanya.

Dugaan adanya praktik "bermain mata" antara oknum rehabilitasi narkoba swasta dengan oknum aparat penegak hukum menjadi noda hitam dalam upaya pemberantasan narkoba.

Ketika hukum bisa dinegosiasikan, dan rehabilitasi dijadikan jalan pintas bagi yang mampu membayar, maka keadilan bukan lagi milik semua—melainkan barang dagangan.

Di tengah pusaran praktik yang dipertanyakan ini, muncul kisah yang menyayat hati. Seorang orang tua, demi menye-

alih-alih mendapatkan pelayanan yang transparan dan profesional, keluarga tersebut justru dihadapkan pada praktik yang janggal. Tidak ada kwitansi, tidak ada bukti pembayaran resmi. Petugas rehabilitasi hanya memotret transaksi melalui telepon genggam—tanpa pernah memberikan salinan kepada pihak keluarga. Seolah-olah uang yang diserahkan itu hilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa pertanggungjawaban.

Pertanyaannya sederhana, namun menyakitkan: apakah penderitaan rakyat kecil memang tidak cukup berarti untuk dihargai dengan kejujuran?

Jika praktik ini benar adanya, maka yang terjadi bukan sekadar

pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Rehabilitasi yang seharusnya menjadi jalan pemulihan justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum. Dan lebih ironis lagi, jika semua ini berlangsung dengan perlindungan atau pembiaran dari aparat yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.

Fenomena ini memperlihatkan wajah ketimpangan yang nyata. Mereka yang lemah harus berjuang mati-matian, bahkan sampai menggadaikan masa depan, sementara sistem yang ada justru membuka celah bagi praktik-praktik gelap untuk terus berlangsung.

Sudah saatnya negara hadir secara nyata. Pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi swasta harus diperketat, dan setiap dugaan keterlibatan oknum aparat harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada kompromi ketika yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik dan nasib masyarakat kecil.

Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang narkoba. Ini tentang keadilan. Tentang kejujuran. Dan tentang apakah negara masih berdiri di pihak mereka yang lemah—atau justru membiarkan mereka berjuang sendirian dalam gelap.

**Penulis warga
Kab. Bandung, Ayah dari
Korban Rehab**



DPR Kritik Wacana 'War Tiket' Haji: Ancaman bagi Jemaah Rentan dan Lansia

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, menolak keras wacana sistem "war tiket" haji yang diusulkan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.

Skema siapa cepat dia dapat dinilai berpotensi menyingkatkan jemaah yang tidak memiliki akses teknologi dan kesiapan finansial instan.

Menurut Atalia, sistem tersebut tidak mencerminkan asas keadilan. Ia menyoroti bahwa hanya mereka dengan perangkat canggih, internet cepat, dan dana siap pakai yang akan diuntungkan.

"Bagaimana nasib ibu-ibu di kampung yang sudah menabung puluhan tahun? Bagaimana dengan

para lansia yang tidak akrab dengan teknologi? Mereka bisa tersingkir," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa wacana ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur sistem antrean berdasarkan nomor porsi pendaftaran (NOPORS).

Lebih jauh, Atalia menjelaskan bahwa sistem antrean saat ini memungkinkan dana awal jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang hasilnya digunakan untuk menekan biaya haji. Jika sistem diubah menjadi pembayaran penuh di awal (lumpsum), maka potensi dana kelolaan akan hilang. "Kalau dana itu kering, siapa yang akan menanggung subsidi? Apakah biaya haji akan melonjak?" ujarinya mempertanyakan.

Atalia pun meminta agar DPR dan pemerintah tidak tergesa-gesa menghapus sistem yang sudah



berjalan. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut harus dihentikan jika belum melalui kajian matang dan partisipasi publik.

Senada dengan itu, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, juga mempertanyakan dasar hukum dari usulan tersebut. Ia menilai narasi yang menyalahkan

BPKH sebagai penyebab panjangnya antrean tidak tepat. "BPKH justru dibentuk untuk mengelola antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap ibadah haji, bukan sebagai penyebab antrean," jelasnya.

Marwan juga mengingatkan bahwa sistem "war tiket" hanya akan menguntungkan kelompok

tertentu, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi lebih. Padahal, regulasi yang ada justru memberi ruang bagi masyarakat yang kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan berhaji.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul dari pemikiran internal kementerian sebagai upaya mencari solusi atas panjangnya waktu tunggu haji.

Ia menyinggung kemungkinan kembali ke sistem lama sebelum adanya BPKH, di mana antrean tidak sepanjang saat ini.

Namun demikian, polemik ini menunjukkan bahwa perubahan sistem haji bukan sekadar soal inovasi, melainkan menyangkut keadilan, keberlanjutan pembiayaan, dan perlindungan bagi jutaan calon jemaah—terutama mereka yang paling rentan tertinggal. **(RED)**

Jokowi Buka Suara soal Desakan JK Tunjukkan Ijazah ke Publik

SURAKARTA | Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) yang mendesaknya menunjukkan ijazah ke publik.

Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegaskan ijazah merupakan dokumen pribadi. Ia memiliki hak penuh atas ijazah tersebut.

Sebaliknya, Jokowi menantang pihak-pihak yang menyebut ijazahnya palsu untuk membuktikan tuduhan mereka.

"Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan," kata Jokowi, Jumat (10/4) lalu.

Jokowi khawatir terjadi preseden buruk jika ia menuruti desakan berbagai pihak untuk menunjukkan ijazahnya. "Nanti semua orang bisa menuduh, dan (yang dituduh) disuruh menunjukkan buktinya. Kebalik-balik itu," kata dia.

Selain mendesak untuk me-

"Ini kan sudah hampir satu tahun. Segera P21 dan segera diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar."

nunjukkan ijazah, JK juga menyebut isu ijazah Jokowi telah berlarut-larut. Polemik berkepanjangan itu, kata JK, meresahkan masyarakat.

Jokowi mengatakan pihaknya sudah melaporkan tuduhan Roy Suryo Cs ke Polda Metrojaya sejak tahun lalu. Namun hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan.

Ia berharap Polisi bisa memproses kasus tersebut lebih cepat agar dapat segera disidangkan di

pengadilan. "Ini kan sudah hampir satu tahun. Segera P21 dan segera diserahkan pada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pengadilan merupakan tempat yang tepat untuk mendapatkan kepastian hukum. Ia pun siap menunjukkan ijazahnya jika diminta hakim di persidangan. "Forumnya jelas, forum hukumnya ada di pengadilan," kata dia.

"Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, ya akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan," lanjutnya.

Sebelumnya, JK mengatakan polemik ijazah Jokowi tidak hanya berdampak secara materiil, tetapi juga memicu perpecahan di tengah masyarakat akibat perdebatan berkepanjangan.

"Waktu kita habis, biaya ongkosnya mahal, dan terjadi perpeca-



han di masyarakat. Pro kontra kan perpecahan, mati-matian di TV. Itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu," kata JK, Rabu (8/4).

Menurut JK, persoalan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya. JK merupakan pendamping Jokowi

ketika memimpin Indonesia periode 2014-2019.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli," ujarinya. **(RED)**

Prioritas Pembangunan Bandung Barat 2027: Fokus Percepatan Infrastruktur

BANDUNG BARAT | Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2027 diarahkan tidak hanya pada penguatan ekonomi dan daya saing saja, tapi diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik.

Demikian disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Bandung Barat 2027 di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, Cimareme, Kamis (9/4/2026) lalu.

"Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar," kata Jeje.

Ia juga mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud asas partisipatif dalam menjangkau saran dan masukan

guna penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2027. Musrenbang RKPD kali ini merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

"(Musrenbang) ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2027," ujarnya.

Jeje mengatakan capaian pembangunan tahun 2025, diantaranya berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan capaian sebesar 71,65 poin, yang didukung oleh sektor kesehatan dengan umur harapan hidup saat lahir mencapai 75,44 tahun.

Kemudian pada sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,34 tahun serta harapan lama sekolah sebesar 12,26 tahun atau setara dengan kelas XII (SMA kelas 3).

Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen. Penurunan angka kemiskinan dari 10,49 persen menjadi 9,98 persen.

Sementara pada sektor ketenagakerjaan, mampu me-



nekan angka pengangguran menjadi 6,60 persen.

Lebih lanjut Jeje mengatakan, jika tahun 2027 merupakan tahun ke-3 periode RPJMD 2025-2029 yang mengusung visi "AMANAH", sehingga perencanaan yang disusun harus mampu mengakselerasi pencapaian visi dan misi tersebut secara terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sesuai dengan arah dan penahapan pembangunan yang telah ditetapkan, tema pembangunan tahun 2027 adalah: "Penguatan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat."

Melalui penguatan ekonomi dan daya saing daerah, diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khu-

hususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting secara bertahap melalui berbagai program.

Ia menjelaskan program tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat, mengurangi kantong-kantong kemiskinan serta bisa meningkatkan pendapatan serta perlindungan sosial yang inklusif. **(PL-11)**

Belajar dari Bandung, Dekranasda Tasikmalaya Bangun Galeri UMKM

BANDUNG | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bandung menerima kunjungan kerja Dekranasda Kabupaten Tasikmalaya pada Selasa 7 April 2026.

Kunjungan ini dalam rangka studi tiru pengelolaan galeri dan pengembangan produk UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif daerah.

Pada kunjungan kali ini para pengurus Dekranasda Kabupaten Tasikmalaya berkesempatan mengunjungi Galeri Patra Komala Kota Bandung di Mal Braga Citywalk.

Ketua Dekranasda Kabupaten Tasikmalaya, Retno Widyastuti, mengungkapkan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari konsep galeri yang akan diterapkan di daerahnya.

Ia berharap pengalaman dari Kota Bandung dapat menjadi referensi dalam menghadirkan galeri



UMKM yang representatif di Kabupaten Tasikmalaya.

"Kami ingin melihat langsung bagaimana pengelolaan galeri di Bandung sebagai bahan pembelajaran karena kami juga berencana membangun galeri UMKM di Tasikmalaya," ujarnya.

Selain itu, Retno juga men-

gaku tertarik dengan produk yang dipasarkan di Galeri Patra Komala tersebut. Bahkan sampai membeli produk fesyen hasil kerajinan Kota Bandung.

"Saya sih lihat motifnya ya, karena saya sukanya yang agak-agak rame, jadi lucu aja sama kualitasnya juga bagus," tuturnya.

"Ke depan, akan ada kolaborasi lanjutan antara Dekranasda Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam pengembangan produk UMKM."

Momen Berbagi Pengalaman

Sementara itu, Wakil Ketua Harian I Dekranasda Kota Bandung, R. Dewi Pertiwi Zulkarnain menyampaikan, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk berbagi pengalaman, khususnya terkait kurasi produk dan pengelolaan Galeri Patra Komala yang menjadi etalase unggulan produk UMKM Kota Bandung.

Dalam kesempatan itu, rombongan dari Tasikmalaya diajak meninjau langsung berbagai produk unggulan yang telah melalui proses seleksi ketat, mulai dari fesyen, kriya hingga aksesoris. Produk-produk tersebut dinilai memiliki daya saing karena mengedepankan kualitas, inovasi serta nilai budaya lokal.

"Ke depan, akan ada kolaborasi lanjutan antara Dekranasda Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dalam pengembangan produk UMKM," kata Dewi.

Salah satu potensi kerja sama yang dibahas adalah pengembangan produk aksesoris, seperti bros khas Bandung yang dapat dipadukan dengan material batik maupun kain khas Tasikmalaya termasuk inovasi terbaru berupa sutra tenun. **(PL-18)**

HIPMI Kota Bandung Jadi Hub Magang Industri

BANDUNG | Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bandung menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung untuk menjalankan program On The Job Training atau magang industri.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di kantor BBPVP Bandung, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (7/4/2026) lalu.

Sekretaris Umum BPC HIPMI Kota Bandung Mukti Widodo mengatakan kolaborasi ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara lulusan pelatihan kerja dengan kebutuhan nyata di dunia usaha.

Menurutnya, banyak peserta pelatihan vokasi yang telah memiliki keterampilan dasar, namun masih membutuhkan pengalaman kerja langsung sebelum benar-benar siap masuk dunia industri.

"Banyak lulusan pelatihan yang sudah memiliki keterampilan dasar, tetapi masih membutuhkan pengalaman kerja langsung. Sementara pengusaha muda membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai," kata Mukti.

Ia menilai program On The Job



Training menjadi salah satu cara untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pelatihan dan dunia usaha.

Melalui kerja sama ini, anggota HIPMI Kota Bandung juga dapat memperoleh akses terhadap calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan dari BBPVP.

Selain itu, skema magang dinilai dapat membantu pengusaha mengurangi biaya dan risiko rekrutmen awal, sekaligus memberi kesempatan perusahaan membentuk calon karyawan sesuai kebutuhan dan budaya kerja masing-masing.

Ketua Bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Riset, Kesehatan,

dan Olahraga BPC HIPMI Kota Bandung Yandi Purnawijaya menambahkan, dalam kerja sama ini HIPMI berperan sebagai penghubung antara BBPVP dengan perusahaan anggota HIPMI yang membutuhkan tenaga kerja.

"Program ini merupakan tindak lanjut dari industrial gathering bersama Pak Menteri Yasierli. Dimana mang Ibam, ketua BPC HIPMI Kota Bandung, berkomitmen terus berperan aktif dalam menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat, khususnya di Kota Bandung," ujar Yandi.

Ia menjelaskan program magang ini menyasar lulusan SMA, SMK, MA, hingga Paket C sederajat. Pada tahun 2026, program tersebut

menargetkan sebanyak 480 peserta dapat mengikuti program magang berbasis proyek atau Project Based Learning (PBL).

Pada tahap awal, peserta magang akan ditempatkan di 11 perusahaan mitra yang telah berpartisipasi dalam program tersebut.

Ian menambahkan, pengusaha yang terlibat dalam program ini tidak hanya menjadi tempat bekerja bagi peserta magang, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung. "Para pengusaha tidak hanya menjadi pemberi kerja, tetapi juga mentor yang memberikan arahan dan pengalaman praktis di lapangan," katanya.

Menurut Ian, program magang ini juga membuka peluang bagi peserta untuk direkrut menjadi karyawan tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik selama masa pelatihan.

Ia berharap kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga pelatihan vokasi dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ke depan kami ingin memastikan link and match antara pelatihan dan dunia usaha benar-benar terjadi, bukan hanya wacana," ujarnya. (PL-12)

Pemkot Cimahi Salurkan Bantuan Pangan CPP

CIMAH | Pemerintah Kota Cimahi mulai menyalurkan bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada puluhan ribu warga penerima manfaat. Program ini diluncurkan secara resmi di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, pada Kamis (09/04), sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi, Mohammad Ronny, yang mewakili Wali Kota Cimahi, menegaskan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan, menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa program CPP merupakan instrumen strategis negara untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Penyaluran bantuan ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah.

Total bantuan yang disalurkan mencapai 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng untuk 41.387 penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Cimahi. Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk alokasi Februari dan Maret 2026. (PL-11)

BAZNAS Distribusikan Dana Secara Massal untuk Pendidikan

KAB. BANDUNG | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung kembali menggelar pendistribusian massal bulanan pada Kamis, (9/4/2026) lalu di Gedung BAZNAS Center.

Berbeda dengan sumber dana pendistribusi bantuan dari zakat, infak dan sedekah (ZIS), kali ini sumber anggaran dari infak sewa Gedung BAZNAS Center yang dikelola BAZNAS kabupaten Bandung.

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung KH. Yusuf Ali Tanto-wi, setelah Gedung BAZNAS Center diambil alih dan dikelola BAZNAS sehingga manfaatnya sudah mulai terasa.

"Alhamdulillah dari infak sewa

ini untuk bantuan kepada warga masyarakat yang sudah lama mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Bandung khususnya di bidang pendidikan," ucapnya.

Acara dihadiri Kepala Kementag Kabupaten KH. Ramlan, Wakil Ketua 1 BAZNAS Ustadz Jamjam Erawan, Wakil Ketua 2 H. Abdul Rauf, wakil ketua 3 H. Dudi Abdul Hadi, dan wakil ketua 4 H. Sarnapi.

Sedangkan H. Ramlan mengatakan, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang harus didukung semua pihak agar bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Seperti pada hari ini BAZNAS memberikan bantuan pendidikan kepada warga masyarakat yang

membutuhkan. Penyaluran bantuan bukan sebatas mendistribusikan uang melainkan BAZNAS sudah mengkaji dan membuat program cukup lama," katanya.

Kementag sebagai lembaga pengawas BAZNAS Kabupaten Bandung bersama dengan Pemkab Bandung berupaya agar operasional BAZNAS bisa berjalan sesuai dengan aturan pemerintah maupun aturan syariah.

"Sebagai pejabat baru di Kabupaten Bandung yang besar di Kabupaten Sukabumi, kami mohon agar bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bandung ini. Semoga penyaluran bantuan BAZNAS ini terus dilanjutkan," katanya. (PL-09)



Santri 'Miftahulhuda Al-Musri' Ciranjang Lolos Google Student Ambassador 2026

CIANJUR | Prestasi membanggakan kembali datang dari dunia pesantren Indonesia. Luthfi Muhammad Fikri Al Zawad, seorang santri dari Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri, berhasil lolos sebagai Google Student Ambassador 2026.

Program global bergengsi yang diselenggarakan oleh Google tersebut merupakan inisiatif internasional yang bertujuan menjaring generasi muda berprestasi dari berbagai negara untuk menjadi agen perubahan dalam bidang teknologi, kepemimpinan, dan pengembangan komunitas digital.

Luthfi, yang lahir di Bandung pada 5 April 2004, berasal dari Kampung Cikokosan, Desa Kertamukti, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat. Ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri yang berlokasi di Kampung Cien-dog, Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.

Keberhasilan Luthfi menjadi bagian dari Google Student Ambassador 2026 tidak diraih secara instan. Di tengah kesibukannya sebagai santri, ia tetap aktif



mengembangkan kemampuan di bidang teknologi digital, komunikasi publik, serta kepemimpinan.

Konsistensi dan semangat belajarnya menjadi faktor utama yang mengantarkannya ke panggung global.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 5 April 2026 di lingkungan pesantren, Luthfi mengungkapkan rasa syukur sekaligus komitmennya atas pencapaian tersebut. "Ini bukan hanya

tentang saya pribadi, tetapi tentang bagaimana santri bisa membuktikan bahwa kami juga mampu berkontribusi di level global. Saya ingin membawa semangat pesantren ke dalam dunia teknologi, bahwa nilai-nilai keislaman dan inovasi bisa berjalan beriringan," ujarnya pada Minggu (5/4/2026) lalu.

Ia juga mengakui bahwa perjalanan menuju titik tersebut tidaklah mudah. Berbagai keterbatasan, mulai dari akses hingga

manajemen waktu antara kegiatan pesantren dan pengembangan diri, menjadi tantangan tersendiri.

"Banyak keterbatasan yang saya hadapi, tapi saya percaya keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Justru dari situ kita belajar untuk lebih kreatif dan pantang menyerah," tambahnya.

Pihak Pondok Pesantren Miftahulhuda Al-Musri turut mengapresiasi pencapaian tersebut. Keberhasilan Luthfi dinilai sebagai

representasi dari visi pesantren dalam mencetak generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Lingkungan pesantren dikenal aktif mendorong para santri untuk berkembang di berbagai bidang, termasuk teknologi dan kewirausahaan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Sebagai Google Student Ambassador 2026, Luthfi akan menjalankan berbagai peran strategis, mulai dari menyelenggarakan edukasi literasi digital, membangun dan mengembangkan komunitas berbasis teknologi, hingga mendorong generasi muda agar lebih siap menghadapi era transformasi digital.

Capaian ini sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya kalangan santri, untuk berani bermimpi besar dan mengambil peran dalam perubahan global. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kehadiran sosok seperti Luthfi menjadi bukti bahwa potensi besar dapat lahir dari mana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. (PL-22)

TKA Instrumen Evaluasi, Bukan Penentu Kelulusan Siswa

BANDUNG | Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menilai, Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen evaluasi untuk mengukur kualitas pendidikan, bukan sebagai penentu kelulusan siswa.

"TKA ini adalah alat ukur kemampuan akademik siswa secara nasional. Hasilnya menjadi semacam 'rapor' bagi kita semua untuk melihat kualitas pendidikan, tetapi bukan penentu lulus atau tidaknya anak-anak," ujarnya.

Farhan mengungkapkan itu di sela-sela meninjau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sekaligus menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia (AKSI) Kota Bandung di SMP Negeri 1 Bandung, Kamis, 9 April 2026 lalu.

Berdasarkan hasil pantauan, pelaksanaan TKA di Kota Bandung berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Infrastruktur pendukung seperti jaringan internet dan pe-

rangkat ujian dinyatakan dalam kondisi optimal.

"Alhamdulillah, secara infrastruktur semua berjalan lancar. Tidak ada kendala, baik dari sisi jaringan maupun perangkat. Pelaksanaan juga dibagi dalam beberapa gelombang untuk memastikan kelancaran," ungkap Farhan.

Peran Strategis Sekolah

Pada kesempatan yang sama, Farhan juga menyampaikan selamat kepada pengurus AKSI Kota Bandung yang baru dikukuhkan, termasuk Ketua DPC AKSI Kota Bandung, Suratman.

Ia mengingatkan, kepala sekolah memiliki peran strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter siswa.

"Sebagai kepala sekolah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membina anak-anak agar tidak tumbuh dengan mentalitas

yang mengarah pada kekerasan," tegasnya.

Menurutnya, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan kompleks, baik yang bersifat lama maupun baru.

Salah satu masalah yang masih berulang adalah potensi tawuran pelajar. Meski tidak berskala besar, Farhan menilai hal tersebut tetap harus ditangani secara serius.

Disrupsi Digital

Selain itu, ia juga menyoroti dampak disrupsi digital yang memberikan dua sisi berbeda bagi perkembangan anak.

"Disrupsi digital membuka akses pengetahuan yang luas bagi anak-anak kita. Namun di sisi lain, tanpa filter yang memadai, mereka juga terekspos pada konten negatif," jelasnya.

Farhan turut mengungkapkan hasil survei Dinas Kesehatan Kota Bandung yang menunjukkan tingginya indikasi gangguan kese-



hatan mental di kalangan pelajar.

"Terdapat sekitar 60 hingga 70 ribu siswa dari tingkat SD hingga SMA di Kota Bandung yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental, mulai dari stres ringan hingga depresi berat," ujarnya.

Fenomena ini, menurutnya, dipengaruhi oleh tekanan sosial, akademik, serta eksposur digital yang semakin tinggi.

Pendidikan Karakter

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung terus mendorong penguatan pendidikan karakter di sekolah.

Salah satu program yang dijalankan adalah menghadirkan instruktur dari unsur TNI dan Polri untuk membina siswa, khususnya di kelas 8 dan 9. (PL-10)

SPMB 2026 Diuji Publik, Disdik Jabar Serap Masukan Berbagai Pihak

BANDUNG | Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat kembali menyelenggarakan uji publik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tikomdik Disdik Jabar, Kota Bandung, pada Kamis (9/4/2026) lalu.

Sekretaris Disdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, menjelaskan bahwa uji publik ini bertujuan memastikan regulasi serta petunjuk teknis SPMB telah melalui proses pengujian yang matang, baik dari internal maupun eksternal. Dengan demikian, pelaksanaan SPMB diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai harapan bersama.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun ini akan dilakukan pemetaan calon pendaftar di



seluruh jalur SPMB. Seluruh siswa kelas IX diwajibkan mengikuti pemetaan tersebut, baik yang berencana melanjutkan ke sekolah

negeri maupun swasta. Ke depan, pemetaan ini akan terus disempurnakan, termasuk kemungkinan dimulai lebih awal, seperti pada bu-

lan Desember, agar memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.

Deden menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi dan pe-

tunjuk teknis tidak terlepas dari masukan serta saran yang diberikan oleh para peserta uji publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Jabar, Iis Rostiasih, menyampaikan bahwa uji publik ini melibatkan berbagai pihak. Di antaranya anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, MKPS, MKKS, FKSS SMA/SMK/SLB Jawa Barat, Dewan Pendidikan Jabar, PGRI, organisasi guru lainnya, serta perwakilan orang tua siswa kelas IX.

Ia berharap, melalui pelaksanaan SPMB yang baik, seluruh siswa SMP atau sederajat dapat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. **(PL-21)**

SMAN 22 Didorong Jadi Pelopor Pelajar Tertib Berkendara

BANDUNG | Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong SMAN 22 Kota Bandung menjadi contoh atau role model bagi sekolah lain dalam membangun budaya tertib dan aman berkendara di kalangan pelajar.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Launching Roadshow Honda Safety Generation 2026 yang digelar di lingkungan sekolah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Farhan menilai edukasi safety riding yang diberikan secara langsung kepada siswa menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran keselamatan sejak dini.

"Saya sangat berharap siswa-siswa SMA 22 bisa menjadi panutan bagi seluruh pelajar di Kota Bandung untuk menjadi pengendara motor yang baik dan aman di jalan," ujarnya Kamis, 2 April 2026.

Farhan mengapresiasi kegiatan edukasi yang menghadirkan praktik langsung di lingkungan sekolah.

Menurutnya, pendekatan seperti ini efektif karena mampu menjangkau siswa yang sebagian

besar mulai menggunakan sepeda motor untuk pertama kalinya.

Ia menilai, pembelajaran tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus menyentuh aspek praktik, mulai dari penggunaan perlengkapan keselamatan hingga teknik berkendara yang benar.

"Edukasi seperti ini penting karena diberikan tanpa sekat. Anak-anak bisa langsung memahami bagaimana berkendara yang aman dan sesuai aturan," katanya.

Dalam arahnya, Farhan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan administrasi seperti kepemilikan SIM dan kelengkapan kendaraan.

Ia bahkan mengusulkan agar layanan SIM keliling dapat hadir langsung di sekolah-sekolah untuk memudahkan siswa.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengendalian emosi saat berkendara, yang kerap menjadi faktor pemicu kecelakaan di jalan raya. "Yang paling penting bukan kecepatan, tapi keselamatan. Dan itu dimulai dari kemampuan kita mengendalikan emosi saat di jalan," tegasnya.



Lebih lanjut, Farhan mendorong agar program serupa dapat diperluas ke sekolah lain di Kota Bandung dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk industri otomotif dan media.

Ia menyebut kolaborasi dengan PT Daya Adi Cipta Motor sebagai langkah positif yang perlu terus dikembangkan.

"Saya mendorong agar kegiatan ini bisa masuk ke sekolah-sekolah lain. SMAN 22 ini bisa jadi contoh bagaimana edukasi keselamatan berkendara dilakukan dengan baik," ungkapnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kota Bandung berharap lahir generasi muda yang tidak hanya terampil berkendara,

tetapi juga memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

SMAN 22 Bandung pun diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membangun budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab di kalangan pelajar, sekaligus menginspirasi sekolah lain di Kota Bandung. **(PL-27)**

Garut Jadi Calon Percontohan Kabupaten Anti Korupsi

GARUT | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menerima kunjungan Tim Observasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam rangka Observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026. Pertemuan berlangsung di ruang rapat sekda, Kamis (9/4/2026) lalu.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan terpilihnya Garut sebagai salah satu calon adalah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi daerah dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa tersebut.

"Bagi kami ini adalah semacam evaluasi. Meskipun kami merasa belum bagus, tapi kalau dipikir-pikir usahanya sudah ada pak," ujarnya.

Bupati menekankan, transparansi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan.



"Kami sangat serius dalam meminimalisasi potensi tindakan korupsi melalui berbagai indikator kinerja seperti MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) dan SAKIP.

"Paling tidak apresiasi saya kepada teman-teman yang sudah menunjukkan usahanya, paling tidak saya sampaikan bahwa kita on the track meskipun saya

merasakan bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, menjelaskan bahwa proses observasi ini merupakan tahap awal untuk memastikan kesiapan daerah sebelum masuk ke tahap bimbingan teknis

(Bimtek).

Andhika menyebutkan bahwa Garut terpilih berdasarkan kriteria ketat, di antaranya skor MCP minimal 75, skor SPI yang stabil, predikat SAKIP minimal B, indeks SPBE yang mencukupi, serta opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut.

"Tapi nomor 8 inilah yang paling sulit kami dapatkan. Karena semua rata-rata ada. Tidak terdapat kepala daerah kepala OPD yang dalam proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi atau tidak pidana lain. Nah kami juga melakukan verifikasi kepada aparat penegak hukum dari kepolisian kejaksaan dan dari KPK sendiri. Dan alhamdulillah kami hadir disini berarti prosesnya masih aman-aman saja," katanya.

Andhika menambahkan, bahwa program ini merupakan kolaborasi lintas sektoral yang

melibatkan lima kementerian/ lembaga, yakni Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkeu, dan Ombudsman RI.

Jika terpilih, Pemkab Garut akan didampingi secara intensif hingga mencapai nilai kelulusan minimal 90 untuk ditetapkan sebagai Kabupaten Antikorupsi.

"Dari 2024 kami sudah melakukan observasi di 6 provinsi. Jadi ada Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Yogyakarta. Dari semua ini akhirnya kami menentukan 2 kabupaten dan 2 kota kami lakukan bimbingan teknis untuk ditetapkan dibantu untuk tahap penilaian," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa predikat Antikorupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang harus tercermin dalam pelayanan publik.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat senantiasa mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam menunjukkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," katanya. **(PL-09)**

KDM Ajak Inspektorat Sidak Samsat, Pastikan Hapus Syarat KTP

BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), telah menginstruksikan tim Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menginvestigasi pelaksanaan Surat Edaran (SE) penghapusan syarat KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan.

Langkah ini diambil untuk memastikan Surat Edaran (SE) Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA berjalan efektif tanpa kendala birokrasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak di Jawa Barat.

"Masyarakat yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik pribadi maupun badan usaha, kini dapat melaksanakan kewajiban pajak tahunan tanpa perlu membawa KTP pemilik pertama," bunyi poin dalam kebijakan tersebut.

Secara teknis, warga cukup membawa STNK asli dan KTP pihak yang saat ini menguasai kendaraan. Kebijakan yang mulai berlaku per 6 April 2026 ini diharapkan mampu mendongkrak kesadaran warga

dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain itu, Pemprov Jabar juga tetap mengimbau masyarakat untuk segera melakukan proses balik nama kendaraan guna kepastian legalitas.

KDM pun mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung. Keputusan ini diambil setelah ditemukan adanya pelanggaran terhadap Surat Edaran (SE) terbaru mengenai penghapusan syarat KTP pemilik pertama dalam pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Instruksi investigasi yang dikemukakan oleh KDM mengacu pada temuan di lapangan dan laporan masyarakat melalui media sosial bahwa implementasi SE belum berjalan optimal. Salah satu yang disinggung adalah pelaksanaan di Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

"Masih ditemukan petugas yang tidak melayani masyarakat dengan baik dan mengabaikan Surat Edaran Gubernur. Maka hari ini, Kepala Samsat Soekarno-Hatta



saya nonaktifkan sementara," tegas KDM di Bandung, Rabu (8/4).

KDM memastikan tim dari Inspektorat dan BKD segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari akar penyebab macetnya implementasi aturan tersebut di tingkat bawah.

"Investigasi ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta mengenai surat edaran tersebut belum dilaksanakan secara efektif. Saya instruksikan seluruh penyelenggara

ra Samsat untuk serius memberikan layanan terbaik dan tidak boleh mengabaikan aturan yang telah ditetapkan," ujarnya.

"Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua. Kita harus memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Jangan mempersulit warga dengan aturan yang sudah kita sederhanakan," pungkask dia.

Dalam postingan sebelumnya,

KDM pun menjelaskan bahwa dengan kebijakan ini diharapkan warga semakin patuh karena terus merasa dipermudah, sekaligus mengajak para pemilik kendaraan melakukan balik nama kendaraannya.

"Karena menggunakan motor dan mobil atas nama sendiri jauh lebih gagah dibanding atas nama orang lain. Jadi, saran saya, ajakan saya, yuk kita balik nama kendaraan bermotor kita," ujar KDM. **(PL-12)**

Puncak HPN, Wabup Sukabumi Bilang Pers Pilar Demokrasi

SUKABUMI | Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi menggelar puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, di halaman Kantor PWI, Kompleks GOR Cisaat, Kamis (9/4/2026) lalu.

HPN tahun ini mengusung tema: "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat".

Hadir Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, jajaran kepala perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta tamu undangan lainnya.

Wabup mengatakan pers adalah pilar demokrasi dan mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.

Ia meminta insan pers di Sukabumi tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan profesional.

"Saya berharap pers terus



mengawal proses pembangunan di Kabupaten Sukabumi, dan tidak segan mengoreksi jika ada kekeliruan di lapangan," ujar wabup.

Wabup yang baru menjabat selama satu tahun satu bulan itu juga menyampaikan permohonan

maaf apabila selama awal masa tugasnya belum terdapat pencapaian besar yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa bersama Bupati Sukabumi, fondasi penguatan arah pemban-

gunan telah ditetapkan.

"Kontrak jabatan kami tinggal tiga tahun sebelas bulan lagi. Meski baru satu tahun, saya bersama Pak Bupati sudah menetapkan pijakan kuat yang insya Allah menjadi arah kemajuan Sukabumi ke depan," ujarnya.

Dalam suasana hangat, Wabup juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 bagi PWI serta ke-16 tahun setelah pemisahan dari PWI Sukabumi Raya. Ia menggunakan metafora jenaka untuk menggambarkan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan pers. "Mudah-mudahan kita tidak seperti kaktus [Kakak Adik Tanpa Status]. Saya berharap kolaborasi ini terus berjalan demi membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarakah" tambahnya.

Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi, menegaskan komitmen organisasi untuk menjalankan fungsi pers secara profesional sesuai tema HPN tahun ini.

"PWI siap menyukseskan visi pembangunan Bupati. Kami akan mengembangkan sikap kritis, santun, dan tetap membangun," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Karya Jurnalistik.

Selain menerima penghargaan, para juara juga berkesempatan memperoleh beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Berikut para pemenang lomba tersebut yakni:

- Juara 1: perwakilan SMAN 1 Parungkuda
- Juara 2: perwakilan SMKN 1 Cibadak
- Juara 3: perwakilan SMAN 1 Simpanan
- Juara Harapan SMAN Jampangkulon. (PL-13)

Aplikasi "Jaga Dapur MBG" Andalan Pengawasan Program Gizi Nasional

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia melalui Bidang Intelijen memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Institusi tersebut menjalin kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional guna mendorong pertukaran data serta mencegah potensi penyimpangan melalui pendekatan intelijen terintegrasi.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, pada Rabu (1/4/2026) di Jakarta dalam kegiatan sinergitas pengawasan dan evaluasi pemenuhan gizi nasional di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur. Reda menegaskan bahwa program MBG berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran utama peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Reda menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menekankan sinergi lintas sektoral untuk memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasa-

ran. Kejaksanaan juga memperluas kolaborasi hingga tingkat desa melalui kemitraan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional sebagai mitra strategis di lapangan.

"ABPEDNAS menjadi mitra strategis untuk mendukung deteksi dini, pengumpulan data aktual, serta pemantauan partisipatif demi menjaga akuntabilitas program hingga tingkat desa," ujar Reda. Kolaborasi tersebut memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kejaksanaan mengoptimalkan pendekatan intelijen melalui tiga pilar utama, yakni pengendalian kualitas pada tahap hulu, transparansi distribusi pada tahap proses, serta validasi penerima manfaat pada tahap hilir. Pendekatan tersebut memastikan setiap tahapan berjalan terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.

Jamintel Reda Manthovani Perketat Pengawasan Program MBG demi Generasi Emas Indonesia. Kejaksanaan juga mengadopsi teknologi digital untuk mendukung

pemantauan secara real-time melalui sistem berbasis data. Sistem tersebut berfungsi sebagai early warning system guna mendeteksi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), termasuk penyalahgunaan anggaran dan kendala distribusi.

Berdasarkan hasil pemantauan di wilayah Tuban dan Bojonegoro, Kejaksanaan mengidentifikasi sejumlah dinamika terkait distribusi dan kesiapan satuan pelayanan. Menanggapi temuan tersebut, Reda menegaskan bahwa pendekatan preventif menjadi prioritas utama dalam penyelesaian permasalahan di lapangan.

"Setiap potensi permasalahan diselesaikan melalui mekanisme administratif, pembinaan, dan edukasi sebelum menempuh langkah penegakan hukum," tegas Reda. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai strategi utama dalam menjaga integritas program nasional.

Seperti disampaikan oleh Sekjen ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, sebagai bagian dari transformasi digital, aplikasi "Jaga Dapur MBG" hadir sebagai instrumen strategis dalam memperkuat



transparansi dan akuntabilitas rantai pasok program. Aplikasi tersebut memungkinkan pemantauan kualitas bahan pangan, kesiapan satuan pelayanan, serta validitas penerima manfaat secara real-time melalui sinergi dengan Bidang Intelijen Kejaksanaan.

Pemanfaatan teknologi digital menghadirkan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi gangguan secara cepat dan akurat. Mekanisme tersebut memungkinkan aparat penegak hukum dan penyelenggara program mengambil langkah korektif secara responsif guna menjaga integritas pelaksanaan kebijakan nasional.

Adhitya Yusma Perdana be-

harap pengawasan berbasis digital dapat memastikan setiap porsi makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi tanpa hambatan administratif maupun teknis. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya generasi sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksanaan. Ia menilai kolaborasi strategis dan pemanfaatan teknologi digital memberikan rasa aman dalam pelaksanaan operasional di lapangan. (PL-29)

Dua Hari Tanpa Nasi, Satu Hati Mengubah Segalanya

Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, di mana suara pedagang keliling bersahut-sahutan dengan tawa anak-anak yang bermain, hiduaplah seorang siswi kelas VI bernama Bunga.

Usianya baru dua belas tahun, tubuhnya kecil, kulitnya sedikit gelap karena sering bermain di bawah matahari, dan rambutnya hampir selalu dikepang dua oleh ibunya setiap pagi sebelum berangkat sekolah.

Bunga bukan anak yang menonjol di kelas. Nilainya biasa saja, pakaiannya sederhana, dan tas sekolahnya sudah mulai usang dengan beberapa jahitan di sana-sini. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda—hatinya yang peka dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain.

Setiap hari, sepuluh sekolah, Bunga melewati gang kecil yang sama. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah tua yang tampak rapuh, catnya mengelupas, atapnya sebagian ditambal seadanya. Rumah itu dihuni oleh seorang nenek tua yang tinggal sendirian. Warga sekitar mengenalnya sebagai Nenek Sari.

Tak banyak yang tahu tentang kehidupan Nenek Sari. Ia jarang keluar rumah, dan jika pun keluar, langkahnya sangat pelan, seperti menahan beban yang tak terlihat. Sebagian orang hanya menganggapnya "orang tua biasa" yang hidupnya memang sudah seperti itu—sepi dan terlupakan.

Namun tidak bagi Bunga.

Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkan satu hal sederhana: "Kalau kamu melihat orang susah, jangan pura-pura tidak tahu."

Kalimat itu terus terngiang di kepala Bunga, bahkan saat ia mulai tumbuh dan memahami bahwa dunia tidak selalu adil.

Suatu sore, sepuluh sekolah, langit terlihat sedikit mendung. Angin berembus pelan membawa bau tanah yang lembap. Bunga berjalan seperti biasa, namun langkahnya terhenti ketika melewati rumah Nenek Sari.

Ia mendengar sesuatu.

Sebuah suara lirih, sangat pelan, hampir tak terdengar.

"Ya Allah... lapar..."

Bunga terdiam. Jantungnya berdecup lebih cepat. Ia menoleh ke arah pintu rumah yang sedikit terbuka.

Ada rasa ragu.

Ada rasa takut.

Tapi ada juga sesuatu yang lebih kuat—rasa peduli.

Dengan langkah kecil, ia mendekat.

"Nenek?" panggilnya pelan, nyaris berbisik.

Tak ada jawaban.

Bunga mendorong pintu itu sedikit. Suaranya berderit pelan. Ia masuk dengan hati-hati, matanya menyesuaikan dengan cahaya yang redup di dalam rumah.

Yang ia lihat membuat napasnya tercekak.

Di sudut ruangan, duduk seorang nenek dengan tubuh yang sangat lemah. Punggungnya bersandar di dinding, matanya sayu, dan wajahnya tampak pucat. Di sekelilingnya, tak ada tanda-tanda kehidupan—tak ada makanan, tak ada aktivitas, hanya sunyi yang terasa berat.

"Nenek Sari..." ucap Bunga pelan.

Nenek itu menoleh perlahan. Butuh beberapa detik sebelum ia menyadari siapa yang datang.

"Oh... Bunga..." suaranya lirih, hampir tak terdengar.

"Nenek kenapa?" tanya Bunga, mendekat.

dadar, dan sedikit sambal buatan ibunya.

Tanpa berpikir panjang, ia membukanya.

Kotak makan itu dikeluarkan, lalu dibuka perlahan.

"Nek... ini makan dulu ya..." kata Bunga sambil menyodorkannya.

Nenek Sari menatap kotak itu, lalu menatap Bunga.

"Tapi itu bekal kamu, Nak..."

Bunga tersenyum kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca.

"Bunga masih kuat, Nek. Nenek dulu ya. Bunga nggak apa-apa."

Tangan Nenek Sari gemetar saat menerima kotak itu. Ia menatap makanan itu seperti melihat sesuatu yang sangat berharga.

Air matanya jatuh tanpa suara.

"Terima kasih... Nak..."

Ia mulai makan perlahan. Setiap suapan terlihat begitu berarti.

Bunga duduk di sampingnya, diam. Ia tidak merasa rugi, tidak merasa kehil-

"Bu..." panggilnya.

Ibunya menoleh. "Sudah pulang, Nak?"

Bunga mengangguk, lalu mendekat.

"Bu... Bunga mau bilang sesuatu..."

Nada suaranya membuat ibunya berhenti mengaduk masakan.

"Ada apa?"

Dengan suara pelan, Bunga menceritakan semuanya—tentang suara lirih itu, tentang kondisi Nenek Sari, tentang dua hari tanpa makan, dan tentang bekal yang ia berikan.

Ibunya terdiam cukup lama.

Matanya mulai berkaca-kaca.

"Kamu tidak takut masuk ke rumahnya?"

Bunga menggeleng. "Awalnya takut... tapi Bunga kasihan, Bu..."

Ibunya menarik napas dalam, lalu mengusap kepala Bunga.

"Kamu melakukan hal yang benar."

Tanpa menunda, ibunya mengambil beras, beberapa telur, mie instan, dan lauk sederhana dari dapur.

"Malam ini kita ke sana," katanya tegas.

Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Bunga dan ibunya berjalan menuju ujung gang. Mereka mengetuk pintu rumah Nenek Sari.

Ketika pintu terbuka, wajah terkejut bercampur haru terlihat jelas.

"Bunga...?" suara Nenek Sari bergetar.

"Kami bawa sedikit makanan, Nek," kata ibu Bunga lembut.

Air mata Nenek Sari kembali jatuh.

Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, rumah kecil di ujung gang itu kembali terasa hidup.

Namun, cerita tidak berhenti di situ.

Keesokan harinya, Bunga menceritakan hal itu kepada teman-temannya di sekolah. Awalnya mereka hanya mendengarkan, tapi lama-kelamaan, rasa iba mulai tumbuh.

Salah satu teman membawa beras dari rumah. Yang lain membawa mie instan. Ada yang menyumbang uang jajan.

Tanpa disadari, sebuah gerakan kecil mulai terbentuk.

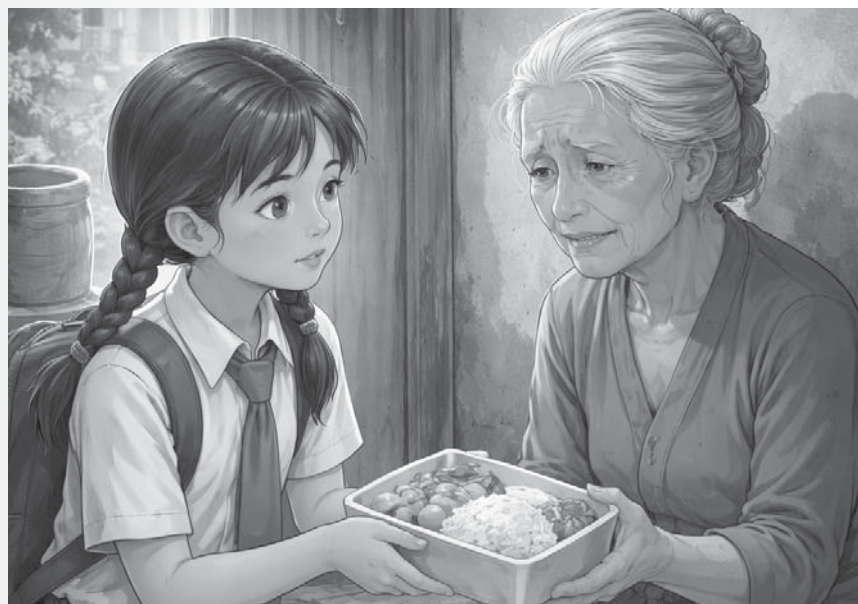
Kabar itu menyebar ke warga sekitar. Orang-orang yang sebelumnya hanya lewat tanpa peduli, kini mulai berhenti dan melihat. Ada yang membantu membersihkan rumah, ada yang rutin mengantar makanan, bahkan ada yang mengajak Nenek Sari berobat.

Semua berubah.

Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana:

Seorang anak kecil yang memilih untuk tidak menutup mata.

Sejak saat itu, setiap kali Bunga melewati ujung gang, ia tidak lagi melihat rumah sunyi. Ia melihat kehidupan. Ia melihat harapan. ****



Nenek Sari tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dipaksakan.

"Tidak apa-apa... cuma... belum makan saja..."

"Belum makan?" Bunga mengulang, matanya membesar.

Nenek itu menggeleng pelan. "Beras sudah habis dua hari lalu... Nenek tidak kuat keluar... kaki sudah sering sakit..."

Kata-kata itu seperti pisau yang pelan-pelan mengiris hati Bunga.

Dua hari.

Dua hari tanpa makan.

Bunga menelan ludah. Ia merasakan perutnya sendiri yang mulai lapar sejak tadi siang. Bekal makan siang masih tersisa setengah di dalam tas—nasi, telur

angan. Justru ada kehangatan yang aneh di dadanya—perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti berbagi.

Namun, setelah beberapa saat, Bunga sadar satu hal.

Ini tidak cukup.

Memberi satu kotak makan hanya bisa menolong untuk hari ini. Bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan hari-hari berikutnya?

Pikiran itu terus menggangukannya sepanjang perjalanan pulang.

Sesampainya di rumah, Bunga langsung mencari ibunya yang sedang memasak di dapur.

Wagub Erwan Lantik 39 Anggota BPSK Jabar

KOTA BANDUNG | Sebanyak 39 anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Jabar periode tahun 2026-2031, di Aula Agus Gustiar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Jalan Asia Afrika No 146 Kota Bandung, Kamis (9/4/2026) lalu.

Ke-39 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 33 anggota BPSK Jabar periode 2026-2031 dan 6 anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Mereka berasal dari sejumlah daerah di Jabar.

Usai melantik kw 39 anggota BPSK Jabar Wakil gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan bahwa BPSK memiliki peran sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat pada sektor perdagangan.



"Perannya juga merangkul masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan menyelesaikan pengaduan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun anggota BPSK yang dilantik ini berasal dari perwakilan Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, dan

Kabupaten Cianjur. Erwan meminta kepada seluruh anggota agar bekerja profesional dan proaktif dalam mendengarkan keluhan masyarakat.

"Ciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan rasa tenang, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha," tambah Erwan. **(PL-29)**

Buku Saku 0% Pastikan Bantuan Sosial...

■ DARI HALAMAN 1

"Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah," ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut,

pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

"Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua," ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta

penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan. "Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan," kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku "0%" merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. **(red)**

Bunda PAUDEma Wakil Indonesia...

■ DARI HALAMAN 1

"Roadmap ini berlandaskan tujuh area prioritas utama: memperluas akses yang merata, meningkatkan kualitas program dan pengalaman belajar, memperkuat tenaga pendidik ECCE, meningkatkan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, memberdayakan keluarga dan masyarakat, memanfaatkan inovasi digital, serta memastikan pembiayaan yang berkelanjutan," papar Mu'ti dalam konferensi pers.

Dokumen tersebut, kata Mu'ti, tidak hanya menjadi acuan strategis, tetapi juga panduan praktis yang bisa diadaptasi oleh masing-masing negara sesuai konteks nasional. "Tersusunnya dokumen ini mencerminkan visi bersama dan tanggung jawab kolektif kita untuk memajukan layanan PAUDdi kawasan," katanya.

Roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang ECCE yang telah diadopsi. "Penyusunan

roadmap ini merupakan langkah konkret untuk menerjemahkan aspirasi menjadi aksi yang terkoordinasi dan terukur," ungkap Mu'ti.

Ia menekankan tantangan utama saat ini bukan lagi pada komitmen, melainkan implementasi di lapangan. "Meskipun komitmen ini memberikan fondasi yang kuat, tantangan kita bersama terletak pada implementasi yang efektif. Sangat penting bagi kita untuk melampaui komitmen kebijakan menuju hasil nyata yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak," katanya.

Mendikdasmen juga menyebut Indonesia berperan sebagai inisiator dalam penyusunan roadmap ini. "Yang ini merupakan peta jalan yang dibuat bersama oleh negara-negara ASEAN dengan Indonesia sebagai host atau sebagai inisiatifnya," kata dia.

Ia menegaskan roadmap ini juga sejalan dengan program nasional, termasuk penguatan pendidikan sejak usia dini. **(red)**

Kejagung Perkuat Pengawasan MBG untuk Tepat Sasaran

■ DARI HALAMAN 1

Menurutnya, pendampingan hukum memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kebijakan dapat dijalankan tanpa keraguan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga memberikan rasa aman bagi para pelaksana program di daerah. Dengan adanya pendampingan, petugas dapat bekerja lebih tenang dan fokus tanpa terbebani kekhawatiran terhadap kesalahan administratif.

Reda juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menekankan agar tidak ada celah penyimpangan, baik dalam proses distribusi maupun pelaksanaan program.

"Kita ingin memastikan setiap anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak," ujarnya. Ia juga menambahkan agar para pelaksana tidak ragu dalam bekerja karena takut kesala-

han administratif. Menurut Reda, pengawalan dari Kejaksaan dapat mendorong profesionalisme sekaligus menjaga integritas program secara menyeluruh. Pengawasan yang ketat diyakini mampu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan pemerintah.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Reda menilai, terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul hanya bisa dicapai melalui pelaksanaan program yang berintegritas dan diawasi secara konsisten.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yuma Perdana, turut menyatakan dukungannya terhadap penguatan pengawasan program tersebut. Ia menilai kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. "Pengawasan yang kuat akan memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Adhitya. **(red)**

Pangandaran Didorong Jadi Wisata Kelas Dunia, Disparbud Jabar Tunggu Kajian Teknis

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mendukung Kabupaten Pangandaran yang akan menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi kelas dunia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Lendra Sofyan menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah mencermati dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2030, yang secara eksplisit menempatkan sektor pariwisata sebagai visi utama pembangunan daerah.

"Artinya, Pangandaran memang menjadikan pariwisata sebagai unggulan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan," ujarnya

lendra, Jumat (10/4/2026) lalu.

Disparbud Jabar telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran sebagai leading sector pembangunan pariwisata. Ia menekankan pentingnya menerjemahkan visi "destinasi kelas dunia" ke dalam konsep yang lebih konkret dan terukur.

"Harus jelas definisinya, mendunia itu seperti apa, indikator keberhasilannya apa. Nanti itu akan ditanyakan dalam evaluasi kinerja," katanya.

Menurutnya, indikator sederhana destinasi kelas dunia antara lain dikenal secara internasional dan mampu menarik wisatawan mancanegara dalam jumlah signifikan.

Ia mengakui bahwa dokumen perencanaan seperti RPJMD masih bersifat normatif. Oleh karena itu, dibutuhkan turunan teknis berupa grand design yang memuat tahapan program secara sistematis.

"Harus diterjemahkan ke langkah konkret: program apa saja, anggaran berapa, siapa yang mengerjakan, dan target waktunya," ujarnya.

Menurut lendra, perencanaan yang matang akan memudahkan pelaksanaan di lapangan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat.

"Kalau sudah terstruktur dan disepakati bersama, masyarakat juga akan ikut mendukung. Bukan dengan cara-cara yang tiba-tiba atau tidak terarah," katanya.

Saat ini, penyusunan rencana teknis tersebut tengah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pangandaran dan terus dipantau oleh Pemprov Jabar. Ia menambahkan, Pangandaran menjadi salah satu prioritas pengembangan wisata bahari di Jawa Barat, bersama wilayah selatan lainnya seperti Pelabuhan Ratu dan Garut.

"Pantai terbaik kita ada di wilayah selatan, dan kunjungannya sudah tinggi. Tinggal bagaimana kualitasnya ditingkatkan agar bisa naik kelas," ujarnya.

Dalam pengembangannya, ia menilai tidak semua harus dibangun dari awal. Fokus utama saat ini adalah memaksimalkan dan merawat fasilitas yang sudah ada. "Yang ada dimanfaatkan dulu, diperbaiki, dipelihara. Baru kemudian dikembangkan bertahap," katanya.

Ia juga menyebut adanya usulan pembangunan baru seperti menara dan infrastruktur lainnya, namun hal tersebut masih dikaji dari sisi kebutuhan dan manfaat.

Menurutnya, untuk menjadi destinasi berkelas dunia, Pangandaran harus memenuhi prinsip dasar pariwisata, salah satunya konsep 4A yaitu administrasi, atraksi, amenity,



Lendra Sofyan

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat

dan akses. Ia menekankan pentingnya penataan kawasan wisata secara menyeluruh, mencontoh pengelolaan destinasi seperti Bali.

"Penataan harus jelas, mulai dari zonasi, lokasi usaha, hingga pengaturan parkir. Tidak boleh semrawut," ujarnya.

Salah satu opsi yang didorong adalah penyediaan kantong parkir terpadu di luar kawasan inti wisata, yang dilanjutkan dengan sistem transportasi shuttle bagi wisatawan.

lendra pun menegaskan, dengan kunjungan wisatawan yang sudah tinggi, tantangan Pangandaran saat ini bukan lagi pada kuantitas, melainkan kualitas. (ADS)



Wagub Jabar Dukung Sophia Rebecca di Miss World Tourism 2026

KOTA BANDUNG | Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mendukung penuh keikutsertaan Sophia Rebecca Albeck pada ajang pemilihan Miss Tourism World 2026 di China Agustus mendatang.

Wagub (wakil gubernur) Jabar Erwan berharap, keikutsertaan dara berusia 19 tahun itu bisa membawa harum Indonesia khususnya Jawa Barat. Dalam Miss Tourism World 2026, Sophia akan memperkenalkan pariwisata dan budaya dari Jawa Barat.

"Kami dari Pemprov Jabar sangat mendukung dan bangga sekali atas keikutsertaan Sophia,

semoga bisa mengharumkan nama Jawa Barat dan Indonesia," kata Erwan usai menerima audiensi Sophia Rebecca Albeck di ruang kerjanya Gedung Sate Bandung, Kamis (9/4/2026) lalu.

Pemilihan Miss Tourism World 2026 diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara. Mereka akan berkompetisi menunjukkan kemampuan personal dalam membangun pengaruh positif di dunia pariwisata.

Wagub Erwan optimistis perwakilan Indonesia akan berprestasi di ajang tersebut karena memiliki ciri khas yang berbeda dengan

negara lain. "Budaya Jabar tolong ditonjolkan sehingga kita punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain," pesannya.

Sophia yang juga Miss Nusantara 2024 ini kemudian meminta dukungan dari masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat. Putri kedua dari dua bersaudara itu menyebut dukungan masyarakat akan memotivasi dirinya dalam perebutan Miss Tourism World 2026.

"Saya mohon dukungan semua pada ajang ini semoga semua berjalan lancar," ucapnya. (ADS)

